



**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEBIJAKAN PENENGGELAMAN
KAPAL ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA
(TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Safrida Yusitarani

11010114140507

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL

ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA

**(TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN
HUKUM NASIONAL)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

SAFRIDA YUSITARANI

11010114140507

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. L. Tri Setyawanta R., SH., MHum
NIP 195506301981031000

Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., MHum
NIP 1962201181987031002

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL
ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA (TINJAUAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL)

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

Safrida Yusitarani

11010114140507

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Februari 2018

Dewan Penguji,

Ketua

Prof. Dr. L. Tri Setyawanta R., SH., MHum

NIP 195506301981031000

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., MHum

NIP 1962201181987031002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Peni Susetyorini, S.H., M.H

NIP 196809121994032001

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

iii

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP 196204101987031003

Mario, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Januari 2018

Safrida Yusitarani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Do good and good will come to you”



Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Mama, Papa, Kakak dan Adik

Keluarga dan sahabat

Almamater Universitas Diponegoro

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA (TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL)** tepat pada waktunya.

Penulisan hukum ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis sadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. **Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. **Ibu Tri Laksmi Indreswari, SH. MH** selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

4. **Prof. Dr. L. Tri Setyawanta R., SH., MHum** selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan dan membimbing penulis selama penulisan hukum ini.
5. **Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., MHum** selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, kesabaran, ilmu dan arahan yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan penulisan hukum ini,
6. **Ibu Peni Susetyorini, SH. MH** selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Internasional dan Dosen Penguji atas waktu, arahan dan bimbingannya selama penulisan hukum ini
7. **Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. **Seluruh staff dan karyawan** Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. **Para penulis** buku-buku dan artikel-artikel yang penulis jadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.
10. **Kedua orang tua tercinta, kakak dan adik-adik, serta keluarga besar** yang telah memberikan banyak dukungan baik secara moril dan materiil yang sangat penting bagi Penulis.
11. **Seluruh sahabat penulis, BOOM** (Salmon Abertnego Maurung, Vina Zihan, Faizah Inas Hadisti, Abigail Sekar Ayu Asmara, Trinita Sirait, Edo Rinaldo), **AbangLambe** (Puspita Dewi, Dita Sasmita, Andyani Angelita, Safira Andita,

Regita Masliani), **SOSIALITA** (Tyas, Rara, Ega, Rahma, Titis, Rahma), **SAGA SMANSA**, Citra Arruum, Gabriella Dinar, **teman-teman se perbimbingan Prof Lazarus dan Prof Adji** (khususnya Epita Pratiwi dan Muhamma Ega), **teman-teman IMHI 2014**, yang memberikan semangat tanpa henti untuk selalu berjuang.

12. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt membalas segala budi baik serta jasa-jasa para pihak yang telah Penulis sebutkan diatas. Penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna maka penulis menerima kritik dan saran demi penulisan yang lebih baik. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang khususnya di bidang Hukum Internasional.

Semarang, 30 Januari 2018

Penulis

Safrida Yusitarani

ABSTRAK

Kementrian Kelautan dan Perikanan memberlakukan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang tertangkap melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Fakta bahwa Indonesia hanya menempati urutan ketiga pengeksport ikan di ASEAN padahal memiliki luas laut paling besar di kawasan menjadi latar belakang pemerintah mengambil langkah terobosan ini, ditambah jumlah rumah tangga nelayan dan jumlah eksportir pengolahan ikan nasional yang terus berkurang dikarenakan banyak kapal yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kesesuaian antara hukum nasional Indonesia dengan Hukum internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982 dan implikasi kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan terhadap ekosistem laut. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder. Dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang dilakukan pemerintah Indonesia bukan merupakan tindakan yang menyalahi aturan UNCLOS 1982 karena penenggelaman kapal sendiri tidak diatur secara tegas dalam konvensi tersebut, selain itu merupakan hak dan kewajiban negara pantai (Indonesia) untuk menjaga kedaulatan di wilayahnya. Kelemahan dalam hukum nasional Indonesia sendiri berupa ketidakkonsistenan peraturan, baik secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan hukum tidak pasti. Kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan ini dianggap kurang memperhatikan aturan dalam UNCLOS 1982 mengenai Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut karena memberikan implikasi buruk bagi ekosistem laut berupa rusaknya keseimbangan ekosistem laut berupa tercemarnya laut dan rusaknya terumbu karang.

Kata kunci : Penenggelaman Kapal, Pencurian Ikan

ABSTRACT

The Ministry of Marine Affairs and Fisheries imposed a policy of drowning a foreign ship of fish thieves caught fishing theft in the territorial waters of Indonesia. The fact that Indonesia ranks only the third largest exporter of fish in ASEAN while it has the largest sea area in the region becomes the background of the government to take this breakthrough step, plus the number of fishermen households and the number of exporters of national fish processing is reduced due to the many ships that do illegal fishing in Indonesian waters. This study aims to find out about the suitability between Indonesian national law and international law regulated in UNCLOS 1982 and the implications of the policy of sinking foreign fishing vessels to marine ecosystems. In an attempt to answer the problem, the writer's using the normative juridical method. The data are obtained from secondary data. And then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The result of the research shows that the policy of sinking foreign ship of Indonesian fishing thief is not an act that violates the UNCLOS 1982 regulation because the sinking of the ship itself is not expressly regulated in the convention, besides it is the right and obligation of coastal state (Indonesia) to keep the sovereignty in its territory. The weakness in Indonesian national law itself is the inconsistency of regulations, either horizontally or vertically which causes the law is uncertain. The disclosure policy of foreign fishing vessels is considered to be less attention to the rules in UNCLOS 1982 on the Protection and Maintenance of the Marine Environment because it provides bad implications for marine ecosystems in the form of damage to the balance of marine ecosystem in the form of marine pollution and coral damage.

Keyword: *Foreign Ship Sink Policy, fish theft*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

2.1 Pengaturan tentang Pemanfaatan Laut menurut UNCLOS 1982

2.1.1 Sejarah Perkembangan Lahirnya UNCLOS 1982.....	13
2.1.2 Sejarah Perkembangan Lahirnya Konsep Hukum NegaraKepulauan.....	19
2.1.3 Pengaturan Hukum tentang Penanganan Kapal Pencuri Ikan dan Pencemaran Laut Menurut UNCLOS 1982.....	22
2.2 Pentingnya Menjaga Keberlanjutan Ekosistem Laut	
2.2.1 Tinjauan Umum tentang Laut.....	26
2.2.2 Tinjauan Umum tentang Pencemaran.....	27
2.2.2.1 Sumber Pencemaran.....	32
2.3 Yurisdiksi Indonesia atas Wilayah Laut menurut UNCLOS 1982	
2.3.1 Tinjauan Umum terhadap Yurisdiksi.....	36
2.3.2 Wilayah Laut di Bawah Kedaulatan Negara.....	43
2.3.3. Wilayah Laut di Bawah Yurisdiksi Negara.....	46
2.3.4. Wilayah Laut di Luar Yurisdiksi Negara.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode pendekatan.....	54
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	55
3.3 Metode Pendekatan Penelitian.....	56
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	60
3.6 Metode Analisis Bahan Hukum.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Terkait Dengan Penenggelaman Kapal di Indonesia

4.1.1 Dasar Hukum Penenggelaman Kapal Pencuri

Ikan 63

4.1.2 Dasar Hukum Pengawas Perikanan..... 77

4.2 Implikasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan

Terhadap Ekosistem Laut di Perairan Indonesia..... 81

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan..... 92

5.2 Saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA